

Kata Pengantar

Dengan mengucapkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT atas limpahan Taufik dan HidayahNya, sehingga penyusun Buku Laporan Kegiatan BKD dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Buku Laporan Kegiatan BKD merupakan publikasi atas semua kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018.

Buku Laporan Kegiatan BKD ini berisikan informasi kegiatan rutin BKD dan data pegawai Tahun 2018, yang nantinya dapat dijadikan sebagai bahan informasi dalam pengambilan kebijakan untuk upaya mewujudkan PNS yang profesional dan sejahtera.

Semoga informasi dan data yang disajikan dalam buku ini bermanfaat.

Tanjung Selor, Desember 2018

Muhamad Ishak, SE., MM



Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	1
1.3 Metode Penyusunan Laporan.....	2
BAB II ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA.....	3
2.1 Struktur Organisasi BKD Provinsi Kalimantan Utara	3
2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah.....	5
BAB III INFORMASI DAN PEGAWAI.....	6
3.1 Data Jumlah Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas Provinsi Kalimantan Utara.....	6



3.2 Data ASN Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin.....	7
3.3 Data ASN Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin.....	9
3.4 Data ASN Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin.....	11
3.5 Mutasi Aparatur Sipil Negara.....	13
BAB IV DOKUMENTASI KEGIATAN BKD.....	19
BAB V PENUTUP.....	47



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap manajemen kepegawaian dituntut untuk bekerja keras meningkatkan mutu dan keakuratan dalam menyajikan data dan informasi kepegawaian di era yang semakin kompetitif ini. Informasi yang semakin variatif diperlukan untuk dapat memberikan informasi yang luas bagi pimpinan, sehingga data yang disajikan sangatlah penting untuk menentukan dan mengambil suatu kebijakan dan kebutuhan yang strategis secara cepat dan tepat.

Kebutuhan akan informasi yang akurat diperlukan diseluruh aspek kehidupan. Dalam kaitan perencanaan dan implementasi dibutuhkan referensi dari sekumpulan data sebagai tolak ukur dalam memutuskan sesuatu. Sebab itu, beberapa instansi pemerintahan memiliki tugas dalam penyajian dan pemeliharaan data untuk berbagai keperluan. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara sebagai satuan kerja perangkat Daerah Kalimantan Utara memiliki fungsi yaitu pengelolaan data kepegawaian dalam bentuk informasi yang beragam.

1.2 Maksud dan Tujuan

Penerbitan “Buku Laporan Kegiatan BKD Tahun 2018” mengandung maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Penyusunan Buku Laporan Kegiatan BKD dimaksudkan untuk memberikan gambaran keadaan jumlah pegawai dan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara di Tahun 2018.
2. Menyajikan informasi data kepegawaian, sehingga dapat diperoleh gambaran/keadaan umum kepegawaian khususnya Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Kalimantan Utara.
3. Menyajikan dokumentasi kegiatan BKD di Tahun 2018 sebagai laporan dan evaluasi guna memenuhi kebutuhan unsur pimpinan dalam rangka perencanaan pembinaan pegawai serta kebutuhan lainnya.



1.3 Metode Penyusunan Laporan

Penyusunan Buku Laporan Kegiatan BKD Tahun 2018 ini disusun dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data kepegawaian didapat dari rekapitulasi data pegawai tahun 2018 dan dokumentasi kegiatan bersumber dari setiap subbidang di BKD Provinsi Kalimantan Utara yang telah menjalankan kegiatan di Tahun 2018.

2. Penyajian Data

Data yang telah diolah, selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel dan grafik, serta dokumentasi kegiatan disusun disertakan dengan narasi kegiatan, sehingga memberikan informasi yang jelas.



BAB II

ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

2.1 Struktur Organisasi BKD Provinsi Kalimantan Utara

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 22 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara, struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai, Membawahkan:
 1. Subbidang Pengadaan dan Pensiun Pegawai;
 2. Subbidang Mutasi Pegawai;
 3. Subbidang Pengembangan Karir Pegawai.
- d. Bidang Pembinaan dan Informasi Pegawai, Membawahkan:
 1. Subbidang Peningkatan Kesejahteraan Pegawai;
 2. Subbidang Kedudukan Hukum dan Disiplin Pegawai;
 3. Subbidang Dokumentasi dan Informasi Pegawai.
- e. Unit Pelaksana Teknis.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana diatur dalam Perda tersebut, dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut ini:



STRUKTUR ORGANISASI BKD PROVINSI KALIMANTAN UTARA



2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 22 Tahun 2016, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan Manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah yang telah ditetapkan Gubernur Kalimantan Utara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut, Badan Kepegawaian Daerah memiliki fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian daerah sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang kepegawaian daerah;
- c. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang mutasi;
- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pengembangan dan pembinaan pegawai;
- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang dokumentasi dan informasi;
- f. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- g. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.



BAB III

INFORMASI DATA PEGAWAI

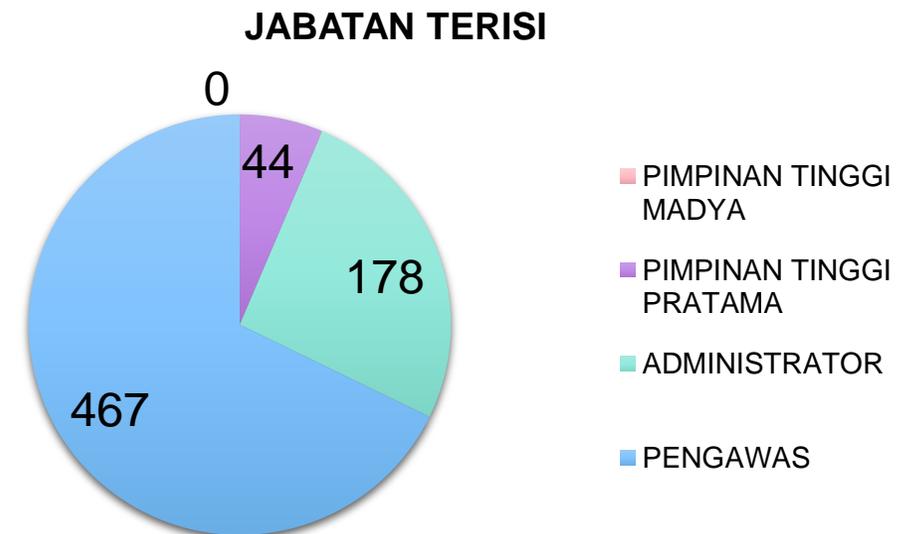
3.1 Data Jumlah Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas Provinsi Kalimantan Utara

Hasil rekapitulasi Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas sampai dengan bulan Desember 2018 berjumlah 721 jabatan, 689 jabatan terisi dan 32 jabatan kosong, termasuk jabatan Pimpinan Tinggi Madya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1 Jumlah Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas Tahun 2018

NAMA JABATAN	TERISI	BELUM TERISI	JUMLAH
PIMPINAN TINGGI MADYA	0	1	1
PIMPINAN TINGGI PRATAMA	44	1	45
ADMINISTRATOR	178	8	186
PENGAWAS	467	22	489
TOTAL	689	32	721

Grafik 3.1 Jumlah Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas Tahun 2018



3.2 Data ASN Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

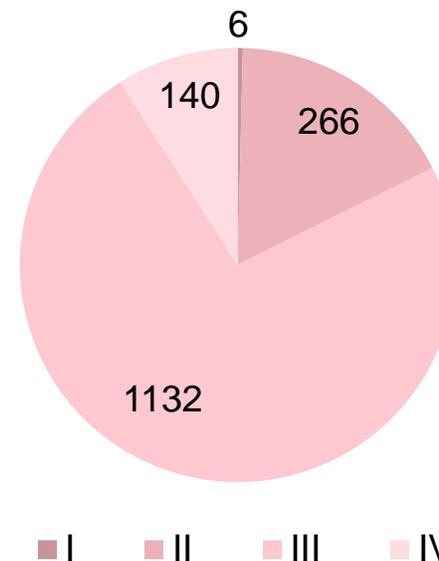
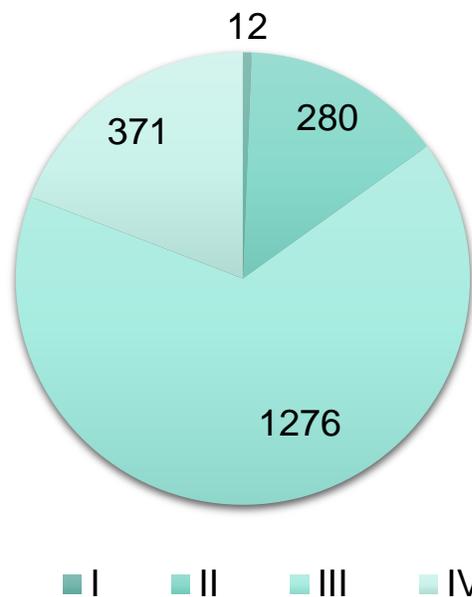
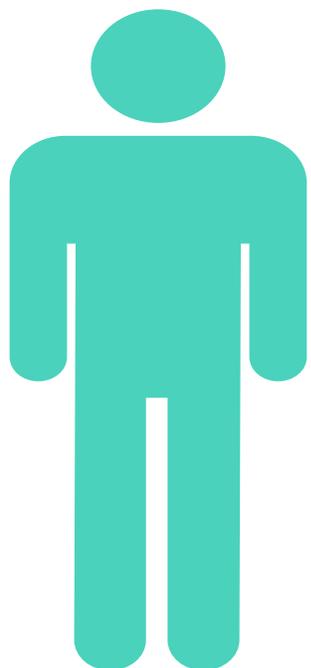
Data ASN berdasarkan golongan adalah tingkat kedudukan setiap pegawai baru yang baru dilantik atau diputuskan sebagai ASN baik dipemerintah pusat maupun daerah sesuai dengan tingkat pendidikan. Berikut adalah jumlah ASN Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan data yang terupdate sampai dengan Desember 2018 sebanyak 3.483 ASN dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.2 Data ASN Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

GOLONGAN	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
I	12	0,34%	6	0,17%	18	0,52%
II	280	8,04%	266	7,64%	546	15,68%
III	1276	36,64%	1132	32,50%	2408	69,14%
IV	371	10,65%	140	4,02%	511	14,67%
TOTAL	1939	55,67%	1544	44,33%	3483	100,00%



Grafik 3.2 Data ASN Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin



1.939

Jumlah Pegawai Laki-Laki

Dengan jumlah mayoritas Golongan III berjumlah 1.276, disusul golongan IV sebanyak 371, disusul golongan II sebanyak 280, kemudian golongan I sebanyak 12 ASN.

Jumlah Pegawai Perempuan

Dengan jumlah mayoritas Golongan III berjumlah 1.132, disusul golongan II sebanyak 266, disusul golongan IV sebanyak 140, kemudian golongan I sebanyak 6 ASN.

1.544



3.3 Data ASN Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin

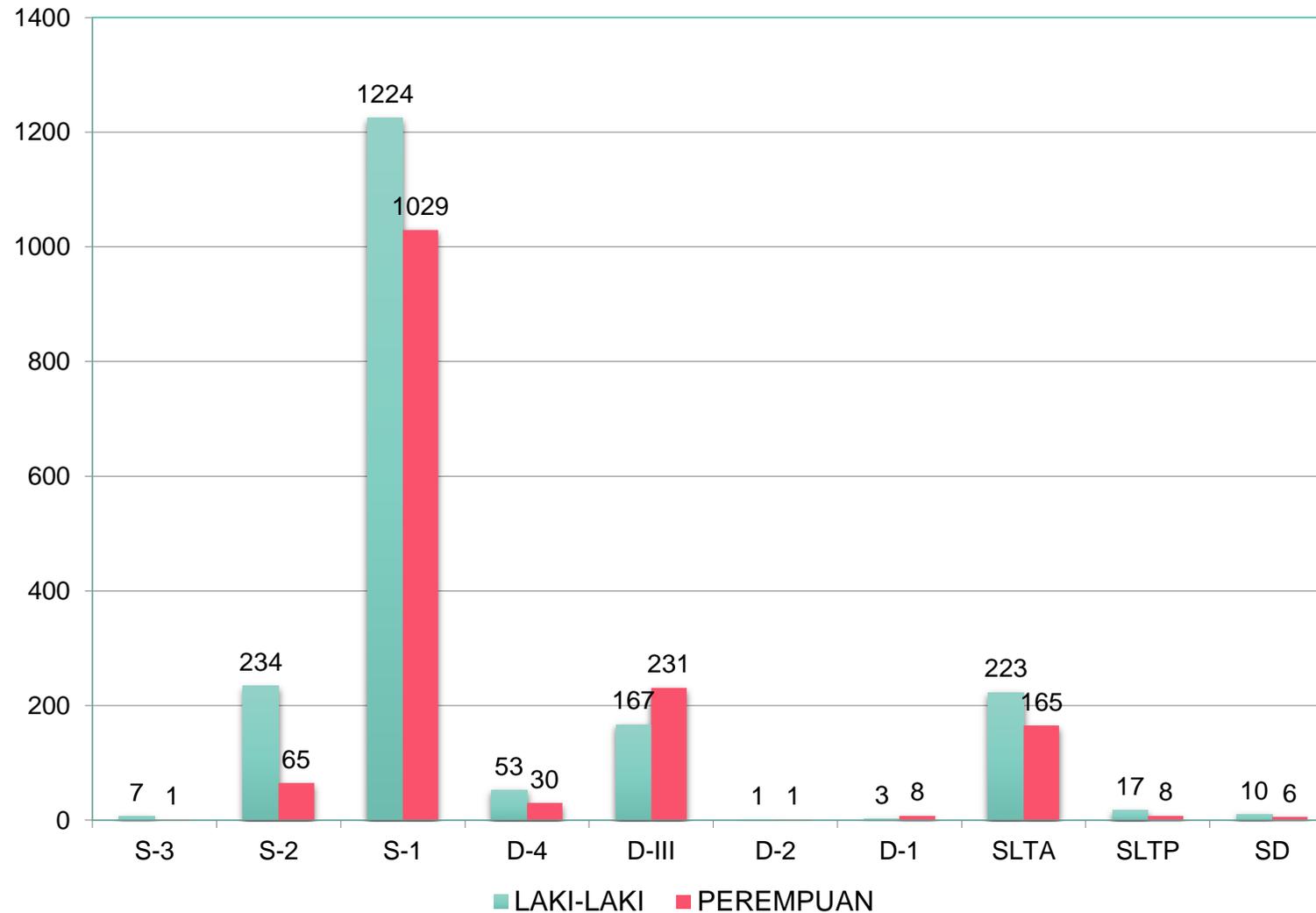
Pendidikan atau prestasi akademik yang dimaksud adalah prestasi akademis yang telah dicapai oleh seorang ASN selama mengikuti jenjang pendidikan pada masa Sekolah Dasar sampai pendidikan terakhir dimana pegawai yang bersangkutan harus melaksanakan tugas dan pekerjaan serta mengemban wewenang dan tanggungjawab.

Tabel 3.3 Data ASN Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin

JENJANG PENDIDIKAN	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
S-3	7	0,20%	1	0,03%	8	0,23%
S-2	234	6,72%	65	1,87%	299	8,58%
S-1	1224	35,14%	1029	29,54%	2253	64,69%
D-4	53	1,52%	30	0,86%	83	2,38%
D-III	167	4,79%	231	6,63%	398	11,43%
D-2	1	0,03%	1	0,03%	2	0,06%
D-1	3	0,09%	8	0,23%	11	0,32%
SLTA	223	6,40%	165	4,74%	388	11,14%
SLTP	17	0,49%	8	0,23%	25	0,72%
SD	10	0,29%	6	0,17%	16	0,46%
TOTAL	1939	55,67%	1544	44,33%	3483	100,00%



Grafik 3.3 Data ASN Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin



Dilihat dari tingkat pendidikan, mayoritas ASN di Provinsi Kalimantan Utara berpendidikan Sarjana S1 sebanyak 2.253 yakni ASN Laki-Laki 1.224 dan ASN Perempuan 1.029.



3.4 Data ASN Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

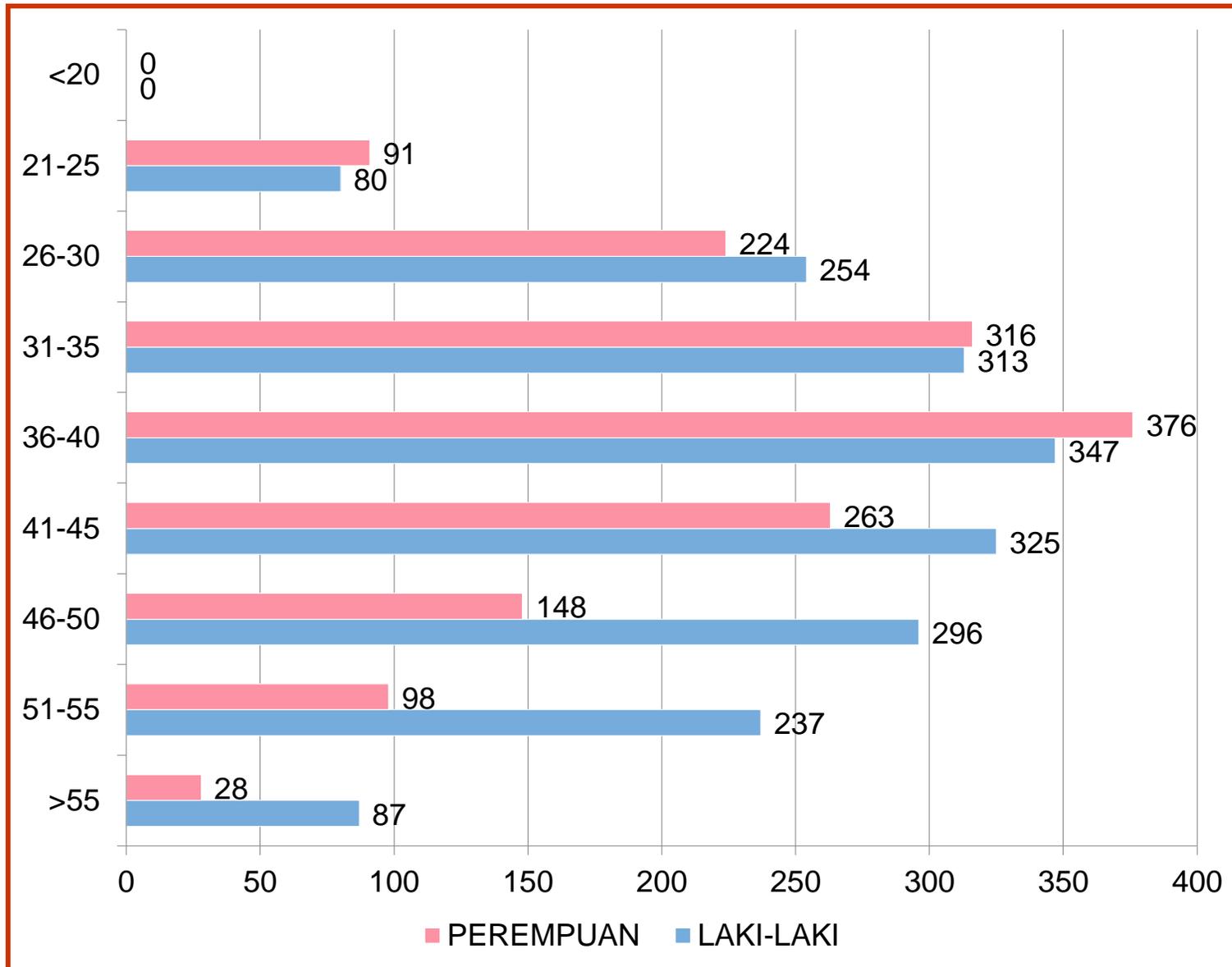
Hasil pengumpulan data pada tabel 3.4 telah tercatat, bahwa jumlah ASN Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan kelompok umur dengan rincian tercatat sebagai berikut:

Tabel 3.4 Data ASN Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

USIA	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
>55	87	2,50%	28	0,80%	115	3,30%
51-55	237	6,80%	98	2,81%	335	9,62%
46-50	296	8,50%	148	4,25%	444	12,75%
41-45	325	9,33%	263	7,55%	588	16,88%
36-40	347	9,96%	376	10,80%	723	20,76%
31-35	313	8,99%	316	9,07%	629	18,06%
26-30	254	7,29%	224	6,43%	478	13,72%
21-25	80	2,30%	91	2,61%	171	4,91%
<20	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
TOTAL	1939	55,67%	1544	44,33%	3483	100,00%



Grafik 3.4 Data ASN Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin



Dilihat dari kelompok umur, mayoritas ASN di Provinsi Kalimantan Utara berumur 36 s.d 40 sebanyak 723 yakni ASN Laki-Laki 347 dan ASN Perempuan 376.



3.5 Mutasi Aparatur Sipil Negara

Mutasi Kepegawaian adalah segala perubahan mengenai seseorang ASN, seperti pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, pemensiunan, perubahan susunan keluarga dan lain-lain. Mutasi atau rotasi kerja dilakukan untuk menghindari kejenuhan ASN pada rutinitas pekerjaan serta memiliki fungsi tujuan lain supaya ASN dapat menguasai dan mendalami pekerjaan lain di bidang yang berbeda pada suatu tempat. Mutasi terkadang dapat dijadikan sebagai tahapan awal atau batu loncatan untuk mendapatkan promosi di waktu mendatang.

a. Mutasi Jabatan

Mutasi jabatan adalah perpindahan pekerjaan seseorang dalam suatu organisasi yang memiliki tingkat level yang sama dari posisi pekerjaan sebelum mengalami pindah kerja, dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan produktivitas ASN;
2. Untuk menciptakan keseimbangan antar ASN dengan komposisi pekerjaan atau jabatan;
3. Untuk memperluas atau menambah pengetahuan ASN;
4. Untuk menghilangkan rasa bosan/jenuh terhadap pekerjaannya;
5. Untuk memberikan perangsang agar ASN mau berupaya meningkatkan karir yang lebih tinggi;
6. Untuk alat pendorong agar spirit kerja meningkatkan melalui persaingan terbuka;
7. Untuk menyesuaikan pekerjaan dengan kondisi fisik ASN.

Mutasi Jabatan di Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 dilaksanakan 3 kali, hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan jabatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), adapun rincian mutasi jabatan sebagai berikut:



Tabel 3.5 Mutasi Jabatan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018

TANGGAL MUTASI JABATAN	NAMA JABATAN	JUMLAH
29 JANUARI 2018	PIMPINAN TINGGI PRATAMA	0
	ADMINISTRATOR	84
	PENGAWAS	171
4 JULI 2018	PIMPINAN TINGGI PRATAMA	1
	ADMINISTRATOR	34
	PENGAWAS	64
1 OKTOBER 2018	PIMPINAN TINGGI PRATAMA	2
	ADMINISTRATOR	1
	PENGAWAS	0



b. Mutasi Masuk dan Keluar Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Mutasi masuk adalah perpindahan pekerjaan seseorang dari luar Provinsi atau Kabupaten/Kota ke dalam Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dengan memenuhi persyaratan tertentu. Mutasi keluar adalah perpindahan pekerjaan seseorang dari dalam Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara ke Kabupaten/Kota atau Provinsi lain dengan memenuhi persyaratan tertentu. Adapun jumlah mutasi masuk dan keluar Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:

Gambar 3.1 Mutasi Masuk dan Keluar Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018

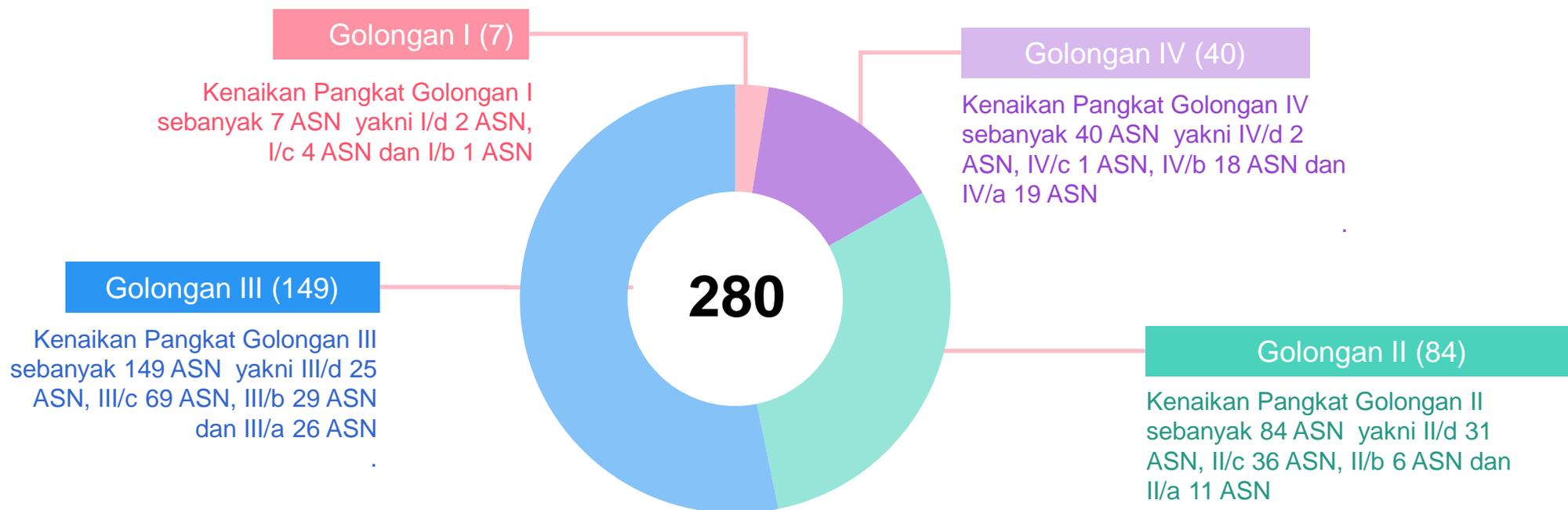


c. Mutasi Kenaikan Pangkat dan Pensiun Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

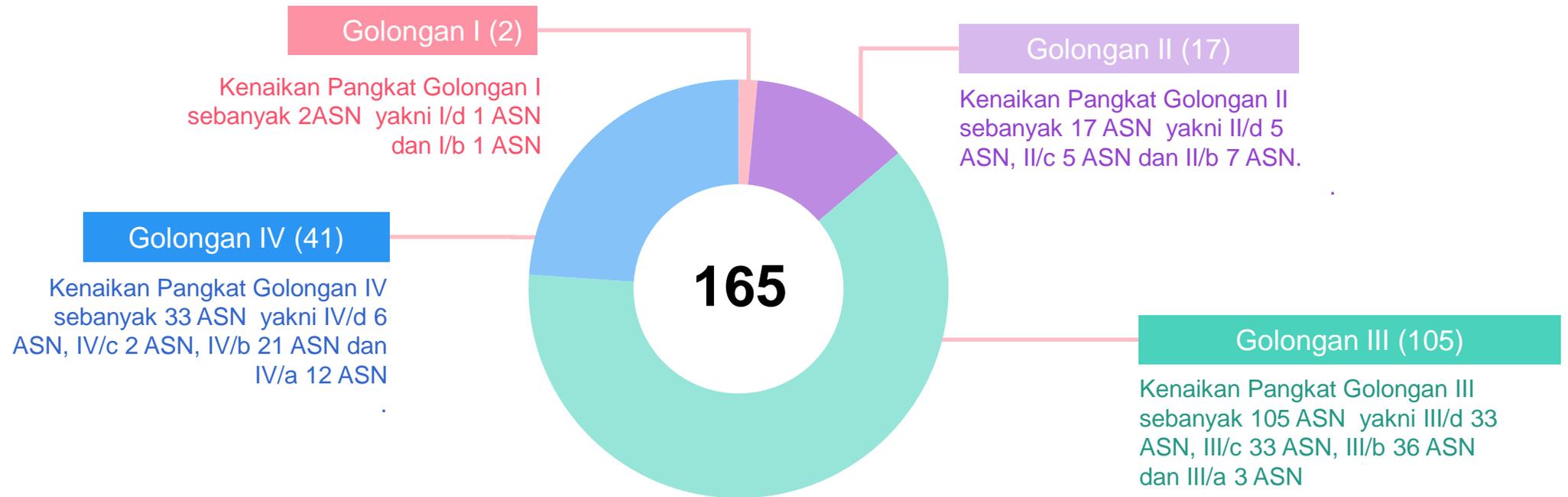
1. Kenaikan Pangkat

Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian ASN terhadap negara, serta sebagai dorongan kepada ASN untuk lebih meningkatkan prestasi kerja dan pengabdian. Agar kenaikan pangkat dapat dirasakan sebagai penghargaan, maka kenaikan pangkat harus diberikan tepat pada waktunya dan tepat pada ASN-nya. Periode kenaikan pangkat merupakan salah satu mutasi kepegawaian yang dilaksanakan 2 (dua) periode yakni 1 April dan 1 Oktober dalam satu tahun yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang kenaikan pangkat. Jenis kenaikan pangkat terdiri dari kenaikan pangkat reguler, pilihan, penyesuaian ijazah dan pengabdian.

Gambar 3.2 Kenaikan Pangkat Periode April 2018



Gambar 3.3 Kenaikan Pangkat Periode Oktober 2018

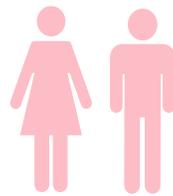
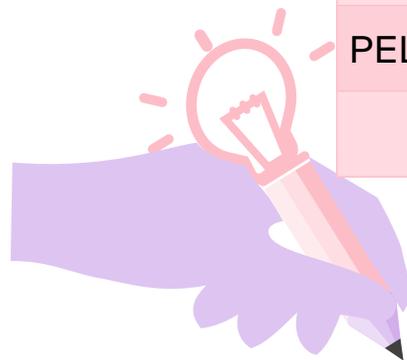


2. Pensiun

Pensiun pegawai dan pensiun janda/duda merupakan jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa ASN selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintah. Pensiun pegawai dan pensiun janda/duda diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda. Tahun 2018 Pensiun pegawai dan janda/duda Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 40 ASN.

Tabel 3.6 Pensiun Tahun 2018

PENSIUN TAHUN 2018	
PIMPINAN TINGGI MADYA	1
PIMPINAN TINGGI PRATAMA	1
ADMINISTRATOR	15
PENGAWAS	9
PELAKSANA	15
JUMLAH	41



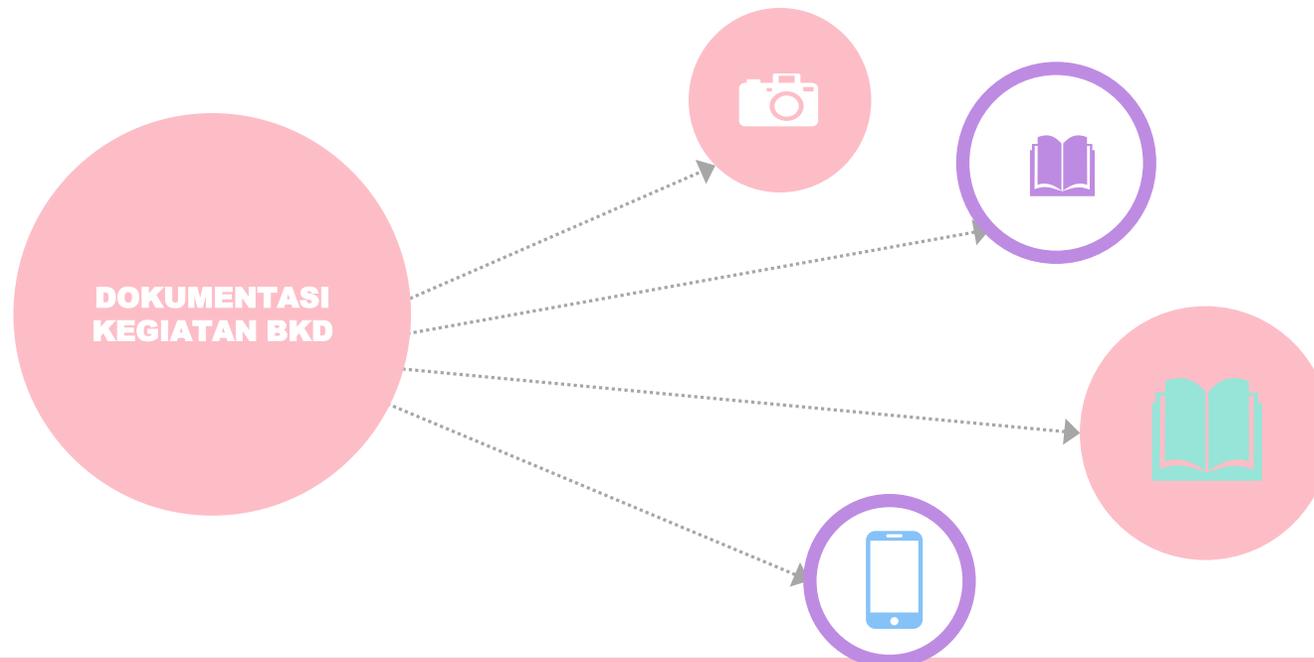
41 ASN Pensiun

BAB IV

DOKUMENTASI KEGIATAN BKD

4.1 Dokumentasi Kegiatan BKD

Dokumentasi kegiatan BKD ini merangkum semua kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara mulai awal hingga akhir Tahun 2018, semua kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi BKD. Dokumentasi kegiatan ini nantinya berfungsi sebagai bahan informasi pelaksanaan kegiatan dan evaluasi untuk perencanaan kegiatan BKD di tahun berikutnya. Berikut dokumentasi kegiatan BKD disertai dengan keterangan kegiatan:



Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Pejabat Administrator, Pengawas Prov. Kaltara sekaligus Pemberian Penghargaan Satyalancana X, XX dan XXX

Tanjung Selor, 29 Januari 2018



Usai Pengambilan Sumpah Pejabat Administrator dan Pengawas dilanjutkan dengan pemberian Satyalancana kepada ASN yang telah mengabdikan selama 10, 20 dan 30 tahun. 203 ASN mendapatkan Satyalancana yakni, 30 tahun sebanyak 35 ASN, 20 Tahun 27 ASN dan 10 Tahun sebanyak 151 ASN.

Pelantikan dan Pemberian Satyalancana dilaksanakan di ruang serbaguna Gedung Gabungan Dinas II, Jumlah Pejabat yang dilantik berjumlah 255 orang, terdiri atas pejabat administrator 84 orang dan pejabat pengawas 171 orang, Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor: 821/49/2-BKD.



Penyerahan SK Pengangkatan CPNS Pemerintah

Provinsi Kalimantan Utara

Tanjung Selor, 19 Maret 2018



Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur menghadiri acara Penyerahan SK Pengangkatan 423 CPNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2017, di Ruang Serbaguna Gedung Gadis II. Hadir dalam acara tersebut Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie, Wakil Gubernur Kalimantan Utara Udin Hianggio, Kepala BKN Bima Haria Wibisana, Kepala LAN Adi Suryanto, para Bupati dan Walikota di Provinsi Kaltara, Kepala OPD.



Pemasangan Mesin Absen Online dan Perekaman Sidik Jari di SMA/SMK/SLB serta UPT Dinas di Provinsi Kalimantan Utara



Proses Pemasangan Mesin Absensi Online di SMA/SMK/SLB



Dalam rangka implementasi Sistem Informasi Absensi Online dan e-Kinerja, maka dilakukan pemasangan perangkat absensi online meliputi mesin absen dan mini server di seluruh SKPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Tahun 2018 ini pemasangan dilaksanakan untuk seluruh SMA/SMK/SLB serta UPT Dinas diluar ibukota provinsi yang memiliki fasilitas jaringan internet.



Proses Perekaman Sidik Jari Guru-Guru SMA/SMK/SLB



Lokasi Pemasangan Absensi Online Provinsi Kalimantan Utara

Pemasangan mesin absen dan mini server dilakukan untuk implementasi absensi online dan e-kerja pada instansi Provinsi Kalimantan Utara, pemasangan dilakukan didalam dan diluar Ibukota Provinsi hampir mencakup semua wilayah kerja kecuali yang tidak memiliki fasilitas jaringan internet. Adapun jumlah titik pemasangan setiap wilayah kerja sampai dengan Desember 2018 adalah:



- 1 Wilayah kerja di Ibukota Provinsi dan Kabupaten Bulungan terdapat 49 titik pemasangan mesin absen dan mini server, pemasangan dilakukan di Kantor OPD, SMA/SMK/SLB, Kantor UPT Dinas termasuk SMA/SMK dan UPT Dinas di Pulau Bunyu.
- 2 Wilayah kerja di Kota Tarakan terdapat 17 titik pemasangan mesin absen dan mini server, pemasangan dilakukan pada RSUD Tarakan, SMA/SMK/SLB serta UPT Dinas Provinsi.
- 3 Wilayah kerja di Kabupaten Nunukan terdapat 7 titik pemasangan mesin absen dan mini server, pemasangan dilakukan pada SMA/SMK/SLB dan UPT Dinas Provinsi.
- 4 Wilayah kerja di Kabupaten Malinau terdapat 9 titik pemasangan mesin absen dan mini server, pemasangan dilakukan pada SMA/SMK/SLB dan UPT Dinas Provinsi.
- 5 Wilayah kerja di Kabupaten Tana Tidung terdapat 4 titik pemasangan mesin absen dan mini server, pemasangan dilakukan pada SMA/SMK dan UPT Dinas Provinsi.
- 6 Wilayah kerja Badan Penghubung Jakarta terdapat 2 titik pemasangan dan 1 titik pemasangan di Badan Penghubung Balikpapan.



Sosialisasi Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor : 111 Tahun 2017 Tentang Tambahan Penghasilan Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan dan Pembinaan Kepegawaian Kepada CPNS, PNS, dan PNS Dipekerjakan di Lingkungan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2018



Kegiatan Sosialisasi dilaksanakan di Tanjung Selor, Tanggal 23 Maret 2018



Narasumber Sosialisasi berasal dari Badan Kepegawaian Daerah, Biro Hukum, dan Inspektorat Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.



Kebijakan Pemberian TPP Tahun 2018:

1. TPP sebagai salah satu aspek dalam sistem pembinaan pegawai.
2. TPP diberikan berdasarkan penilaian kinerja dan kehadiran kerja.
3. TPP merupakan penghasilan dalam bentuk uang di luar gaji dan tunjangan untuk meningkatkan motivasi dan kinerja ASN secara optimal.



Sosialisasi Peraturan di RSUD Tarakan

Tanggal, 10 April 2018

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dilaksanakan untuk menyatukan persepsi/pemahaman kepada seluruh ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mengenai Tata cara pelaksanaan dilingkungan kerjanya masing-masing berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku.



Kunjungan Kerja BKD Pemerintah Provinsi Jawa Barat ke BKD Provinsi Kalimantan Utara

Tanjung Selor, 16 April 2018

Kunjungan kerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat bertujuan untuk melakukan konsultasi teknis, terkait pelaksanaan rekrutmen CPNS di lingkup Pemprov Kaltara. Mulai dari seleksi kompetensi dasar (SKD) hingga seleksi kompetensi bidang (SKB). Kedatangan Pemprov Jabar disambut oleh Asisten Bidang Administrasi Umum, Bapak Drs. H. Zainuddin HZ M.Si.



KEGIATAN PENATAAN SISTEM APLIKASI PELAYANAN KEPEGAWAIAN (SAPK)

Jakarta, 19-20 April 2018



Kegiatan Penataan SAPK merupakan kegiatan rutin yang diadakan oleh BKD Prov Kaltara untuk seluruh admin dan pengguna aplikasi SAPK di Prov Kaltara, guna menciptakan pelayanan prima bidang kepegawaian. Kegiatan SAPK Tahun 2018 dilaksanakan di kantor BKN Jakarta.



HUT Kaltara ke - 5

Tanggal 22 April 2018
merupakan Hari Ulang
Tahun Kalimantan Utara
yang ke - 5

Dalam rangka memperingati HUT Kaltara yang ke - 5, Badan Kepegawaian Daerah turut memeriahkan dengan mengikuti stand pameran OPD serta mengadakan kegiatan Donor Darah dan Pemeriksaan Kesehatan dengan dibantu tenaga kesehatan dari PMI Kabupaten Bulungan dan Dinas Kesehatan Provinsi





Guna meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) serta mengaplikasikan Peraturan Gubernur (Pergub) Kalimantan Utara (Kaltara) Nomor 111 tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja, maka setiap ASN diwajibkan mengisi laporan harian e-Kinerja. Aplikasi e-Kerja Berbasis Web dan dapat diakses melalui simpeg.kaltaraprov.go.id dengan login menggunakan NIP masing-masing ASN.



Sosialisasi e-Kinerja Kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

Tanjung Selor, 7 Mei 2018





Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kepegawaian

Tanjung Selor, 15 Mei 2018

Kegiatan Rapat Koordinasi e-Kinerja membahas materi:

1. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
2. Peraturan BKN No. 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil.
3. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara No. 49 Tahun 2017 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Provinsi Kalimantan Utara.
4. Bantuan Hukum Aparatur Sipil Negara.

Narasumber Kegiatan:

1. Drs. Harus Arsyad, SH., MH, Kepala Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian.
2. Kukuh Heru Yanto, SH., MH, Kepala Bidang Bantuan Hukum Kepegawaian.

Rapat Koordinasi e-Kinerja

Dalam rangka evaluasi implementasi Aplikasi e-Kinerja dilingkungan Provinsi Kalimantan Utara Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan
Tanjung Selor, 30 – 31 Mei 2018



Rapat Koordinasi e-Kinerja merupakan sosialisasi tahap akhir, terkait implementasi aplikasi e-Kinerja ini dengan perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang nantinya diperoleh. Sebelumnya telah dilakukan beberapa kali sosialisasi pada Januari hingga April terkait dengan cara pengisian e-Kinerja. Evaluasi akhir ini terfokus pada upaya untuk menghindari perhitungan yang kurang kongkrit, baik kekurangan maupun kelebihan saat menerima pembayaran TPP.



Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji



Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018.
Tanjung Selor, 4 Juli 2018



Ir. H. Syaiful Herman M.AP dilantik dan diambil sumpahnya oleh Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie untuk menjabat sebagai Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kalimantan Utara.

Dalam kegiatan tersebut juga dilantik 1 orang pejabat pimpinan tinggi pratama, Risdianto S.Pi, M.Si yang sebelumnya Kepala Biro (Karo) Pembangunan menjadi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kaltara dan pelantikan 34 pejabat administrator serta 64 pejabat pengawas dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov Kaltara.



Sosialisasi Sistem Pengusulan KARPEG, KARIS dan Karsu Online (SI-Apek) serta Verifikasi dan Pencetakan

Tanjung Selor, 23 Juli 2018



Sosialisasi Si-Apek adalah sebuah sistem aplikasi yang bertujuan guna memangkas alur dalam proses pengusulan pelayanan kepada BKN, aplikasi ini berbasis WEB sehingga dapat diakses secara online dan tidak membutuhkan spesifikasi perangkat khusus pada level pengguna dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah.

Selain sosialisasi Si-Apek BKD juga melaksanakan verifikasi dan pencetakan 48 Karpeg, 69 Karis dan 49 Karsu, berdasarkan usul yang masuk ke BKD dari OPD Pemprov Kaltara.



Penyerahan Surat Keputusan Pengangkatan CPNS Menjadi PNS Formasi Guru Garis Depan (GGD) tahun 2017 dan Pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018

Tanjung Selor, 29 Agustus 2018



Sebanyak 167 CPNS formasi Guru Garis Depan (GGD) Tahun 2017 resmi mendapat Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Dr. H. Irianto Lambrie diruang Serbaguna Gedung Gadis Pemprov. Kaltara. Acara tersebut dilanjutkan dengan pengambilan sumpah/janji 149 Pegawai Negeri Sipil. Pengambilan sumpah/janji merupakan hal yang sangat penting karena merupakan suatu ikrar dalam melaksanakan tugas, dan sebagai salah satu usaha untuk menjamin pelaksanaan tugas kedinasan dengan penuh tanggung jawab. Ikrar ini tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada pimpinan atau institusi saja, namun juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, bagi PNS yang telah diambil sumpahnya agar dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan penuh tanggung jawab. PNS diharuskan untuk selalu mengembangkan dan meningkatkan kompetensi, memegang teguh integritas, independensi dan profesionalitas sebagai PNS.



Kegiatan Penerimaan Capra IPDN Tahun 2018

Penerimaan calon Praja IPDN dilakukan melalui proses seleksi secara nasional dengan menggunakan sistem online terkait dengan informasi tentang jadwal seleksi, persyaratan pendaftaran, pendaftaran calon, informasi tentang materi dan tempat pelaksanaan tes.



Tahun 2018 untuk Provinsi Kalimantan Utara kuota yang disediakan sebanyak 32 Orang dan yang lulus untuk mengikuti tes Pantukhir 34 Orang, terdiri dari Laki-laki sebanyak 23 Orang dan Perempuan 11 Orang dari 5 kabupaten / kota

Kota Tarakan	: 13 Orang	(L = 9) (P = 4)
Kab. Bulungan	: 12 Orang	(L = 8) (P = 4)
Kab. Nunukan	: 6 Orang	(L = 4) (P = 2)
Kab. Malinau	: 2 Orang	(L = 1) (P = 1)
Kab. Tana Tidung	: 1 Orang	(L = 1) (P = 0)

Passing Grade ditahun 2018 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Dimana TWK (Tes wawasan Kebangsaan) naik sebesar 5 poin dari 70 menjadi 75

TIU (Tes Intelegensi Umum) naik dari 5 poin dari 75 menjadi 80 dan

TKP (Tes Karakteristik Pribadi) naik 17 poin dari 126 menjadi 143.

Tahapan seleksi

21 - 31 MEI : TKD (Tes Kompetensi Dasar) lulus 96 orang dari 351 orang

3 – 7 JULI : Tes KESEHATAN lulus 51 Orang dari 96 orang

27 – 28 JULI : Tes PSIKOLOGI lulus 34 Orang dari 51 orang

10 - 14 AGUSTUS : Penerimaan PANTUKHIR & VERIFIKASI Dokumen Untuk Kalimantan Utara dijadwalkan tanggal 13 Agustus 2018 di Jatinangor

16 AGUSTUS : Pengumuman Verifikasi

17 - 26 AGUSTUS : KESEHATAN

18 - 27 AGUSTUS : KESAMAPTAAN

28 - 30 AGUSTUS : WAWANCARA

31 AGUSTUS : Pengumuman PANTUKHIR

Di tahun 2018 ini kuota untuk Kalimantan Utara sebanyak 32 orang dan yang berhak mengikuti pantukhir sebanyak 34 orang. Hasil akhir PANTUKHIR sebanyak 33 orang.



Tugas Belajar dan Ijin Belajar

Ijin belajar adalah mengikuti sekolah formal untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dengan biaya sendiri dilakukan di luar jam kantor yang tidak mengganggu tugas pekerjaan sehari-hari. c. Pemberian Tugas Belajar/Ijin Belajar bagi PNS harus memenuhi ketentuan yang telah ditentukan sesuai dengan surat keputusan.

Tugas belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam maupun di luar negeri, bukan atas biaya sendiri, dan meninggalkan **tugas** sehari-hari sebagai PNS

JUMLAH PESERTA TUGAS BELAJAR TAHUN 2018 PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NO	TUGAS BELAJAR	JUMLAH	KETERANGAN
1	S-I	-	-
2	S-II	5	2 APBD, 3 APBN
3	SPECIALIS	12	5 APBD, 7 APBN
TOTAL		17	

PESERTA IJIN BELAJAR TAHUN 2018 PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NO	IJIN BELAJAR	JUMLAH	KETERANGAN
1	D-III	14	Program RPL Tenaga Kesehatan
2	S-I	33	
3	S-II	20	
4	S-III	1	
TOTAL		68	



Rapat Kerja (Raker) Kepegawaian Povinsi Kalimantan Utara

Tanjung Selor, 24 September 2018

Kegiatan Raker Kepegawaian merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh BKD Prov. Kaltara guna meningkatkan pelayanan kepegawaian dalam meningkatkan kualitas aparatur yang professional di Kaltara. Raker kali ini dibuka oleh Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara) H Udin Hianggio. Hadir pula dalam Raker tersebut, Kepala Pusat Pengembangan ASN Badan Kepegawaian Negara (BKN) Ahmad Jayus, Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin, Slamet Nugroho, dan Kepala PT Taspen (Persero) Cabang Tarakan, H Kamiso dan peserta raker yang berasal dari pengelola kepegawaian OPD dan BKPSDM dan BKPP Kabupaten/Kota.

Tema raker kepegawaian tahun ini adalah “Manajemen Kepegawaian dan Terpadu dan Bersinergi”.



Pelantikan Penjabat Sekretaris Daerah, Pejabat Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Tanjung Selor, 1 Oktober 2018



Gubernur Kalimantan Utara Melantik Penjabat Sekretaris daerah Provinsi Kalimantan Utara, 2 Pejabat Tinggi Pratama dan 1 Pejabat Administrator di ruang serba guna gedung Gadis II. Adapun Pejabat yang dilantik adalah :

1. Ir. H. Syaiful Herman, M.AP sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
2. DT Iqro Ramadhan, S.Sos, M.Si sebagai Kepala Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara;
3. Sunardi, ST. MT sebagai Kepala Biro Pembangunan Setprov. Kalimantan Utara;
4. Dr. DT Iman Suramenggala, S.Hut, M.Sc sebagai Kepala Bidang Perhubungan Laut, Sungai, Danau dan Penyebrangan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara.



Kegiatan Ujian Dinas (UDIN) dan Ujian Penyesuaian Ijazah (UPI) Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara Tahun 2018

Tanjung Selor, 15-16 Oktober 2018

Tujuan diselenggarakan Ujian Dinas adalah untuk mengetahui tingkat kemampuan setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan naik pangkat/golongan yang lebih tinggi yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan daripada Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat adalah untuk mengetahui atau mengukur tingkat kemampuan serta kompetensi yang dimiliki oleh setiap PNS yang akan mengajukan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah berdasarkan Ijazah yang dimilikinya.

Total Jumlah Pendaftar 63 Orang
UDIN : 34 Orang
UPI : 29 Orang

Jumlah Setelah diverifikasi 47 Orang
UDIN : 24 Orang
UPI : 23 Orang

Jumlah Peserta hadir Tes CAT 37 Orang,
tidak hadir 10 orang

Ujian Dinas Tk. I : 15 Orang
Ujian Dinas TK. II : 4 Orang
Ujian PI (SMA) : 3 Orang
Ujian PI (S-1) : 15 Orang

Jumlah Peserta hadir Tes Wawancara 36
Orang, tidak hadir 1 orang

Jumlah peserta yang lulus ujian sebagai berikut :

Ujian Dinas Tk.I sebanyak 14 Orang
Ujian Dinas Tk. II sebanyak 4 Orang
Ujian Penyesuaian Ijazah sebanyak 18 Orang

Jumlah peserta yang tidak lulus
Ujian Dinas Tk.I sebanyak 2 Orang
Dengan keterangan 1 peserta tidak mengikuti tes CAT dan 1 peserta tidak mengikuti tes wawancara.



Kegiatan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018

Penerimaan CPNS Pemrov Kaltara Tahun 2018 diumumkan tanggal 19 September 2018 berdasarkan keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor: 800.08/692/2.1-BKD tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2018, dilanjutkan dengan pendaftaran online pada (<https://sscn.bkn.go.id>) dan penyerahan berkas yang dilaksanakan pada tanggal 26 September s.d 15 Oktober 2018. Penyerahan berkas CPNS wajib diserahkan langsung oleh pelamar dan akan langsung diverifikasi oleh verifikator berkas CPNS yang berada di Kantor BKD Gedung Gadis II Lt. 2 Tanjung Selor.

Setelah berkas selesai diverifikasi secara faktual akan dilanjutkan dengan verifikasi berkas secara online.

Dari seleksi berkas, pelamar yang lulus verifikasi (memenuhi syarat) sebanyak 4.754 peserta berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor: 800.08/700/2.1-BKD.



Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan Metode Computer Assisted Test (CAT) yang berlangsung dari tanggal 1 s.d 10 November 2018 di Lab CAT Pemprov Kaltara, setiap harinya dibagi menjadi 5 sesi terkecuali hari Jum'at akan dilaksanakan 4 sesi. Peserta yang dinyatakan lulus SKD selanjutnya mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) sesuai dengan pengumuman Gubernur Kalimantan Utara Nomor: 810/969/2.1-BKD tanggal 3 Desember 2018, dari pengumuman tersebut terdapat 911 peserta seleksi SKB yang berlangsung tanggal 7 s.d 9 Desember 2018.



Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) KORPRI IV Tingkat Nasional di Jakarta

KORPRI Provinsi Kalimantan Utara mengikuti MTQ KORPRI IV Tingkat Nasional di Jakarta, KORPRI Prov. Kaltara mengirimkan 14 peserta untuk mengikuti cabang-cabang lomba dengan didampingi pelatih dan official. Sebelum bertanding peserta MTQ mengikuti Training Center (TC) yang dilaksanakan di wisma Syahida Inn, disini peserta dibimbing dan dilatih guna pemantapan materi.



Pelaksanaan MTQ KORPRI IV berlangsung dari tanggal 10 s.d 18 November 2018 diikuti kafilah dari 34 provinsi dan 76 kementerian/lembaga. Dalam kegiatan tersebut KORPRI Provinsi Kalimantan Utara meraih Juara II dalam Cabang Khath al-Qur'an, Gol. Kaligrafi Kontemporer (Putra) dan Juara Harapan II Golongan Da'l dan Da'iyah (Putra).



REKON DATA SERTA EVALUASI SIAO, SIMPEG DAN E-SKP

Tanjung Selor, 26 November 2018



Kegiatan Rekon Data dan Evaluasi SIAO, SIMPEG dan e-SKP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2018 dilaksanakan di ruang Pertemuan Hotel Lotus Panaya Kota Tarakan, peserta berasal dari bagian kepegawaian seluruh OPD/UPT/Cabang Dinas pemerintah provinsi Kalimantan Utara dengan jumlah peserta 99 orang, acara dibuka oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Muhamad Ishak, SE, MM. Dalam sambutannya Kepala BKD berpesan kepada seluruh peserta untuk rajin dan giat mengisi data baik itu SIMPEG maupun SAPK agar data tersebut selalu ter update. Apabila data pegawai tidak terupdate maka bisa merugikan pegawai yang bersangkutan. Kegiatan ini dibagi menjadi 3 (tiga) materi, materi pertama Evaluasi SIAO Dalam Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Absensi Terintegrasi dengan Narasumber Kepala Badan Kepegawaian Daerah. Kepala BKD membawakan materi evaluasi SIAO serta menghimbau agar Operator SIAO selalu memantau kehadiran pegawai SKPD setiap hari. Apabila ada pegawai yang tidak masuk maka operator SIAO wajib melakukan konfirmasi ke pegawai tersebut kenapa tidak masuk kerja. Apabila memang pegawai tersebut memang absen kerja maka harus ditindak lanjuti pembinaan atau penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan peraturan yang berlaku. Materi kedua Pembinaan dan Evaluasi SKP dengan Narasumber Bapak Andi Hikmal, S.Sos dan Ibu Mellinda Nencytarani, S.Kom, membawakan materi :

- Dasar Penilaian Prestasi Kerja : Inpres No 3 Tahun 2003;
- PP No 46 Tahun 2011, Perka BKN No. 1 Tahun 2013, SE Menpan RB No 2 Tahun 2013;
- Hasil Evaluasi SKPD Prov. Kaltara Tahun 2017;
- Sistem penilaian prestasi kinerja milik BKN.

Materi ketiga rekon data dan Evaluasi SIMPEG, materi ketiga ini juga diikuti oleh bagian data BKPSDM/BKPP Kabupaten Kota, Narasumber Bapak Andi Hikmal, S.Sos dan Ibu Mellinda Nencytarani, S.Kom membawakan materi Sinkronisasi Data antara SAPK dan SIMPEG. Sinkronisasi Data antara SAPK dan SIMPEG ini dilakukan mengingat validasi data yang merupakan hal penting dalam pelayanan kepegawaian.



Hari Ulang Tahun (HUT) ke-47 KORPRI dan Peringatan HUT ke-73 PGRI

Tanjung Selor, 29 Nopember 2018

Memperingari Hari Ulang Tahun (HUT) ke-47 KORPRI sekaligus dirangkai dengan peringatan HUT ke-73 PGRI diselenggarakan upacara di Lapangan Agathis Tanjung Selor dengan peserta upacara seluruh jajaran ASN dan para Guru, sebagai Inspektur Upacara (Irup) Dr H Irianto Lambrie. Dalam upacara tersebut disampaikan sambutan Presiden Joko Widodo dan sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI Muhadjir Effendy.

Upacara HUT ke-47 KORPRI dan HUT ke-73 PGRI juga dirangkai dengan acara tambahan yaitu:

1. Pemberian tanda jasa Satyalancana;
2. Pemberian Surat Kenaikan Pangkat Periode Oktober;
3. Lauching Sistem Informasi GTK dan Si Detektif ASN.



Sosialisasi Bantuan Hukum KORPRI Dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Tarakan, 4 Desember 2018

Kegiatan ini dilaksanakan di ruang pertemuan RSUD Tarakan Lantai 6 dengan mengundang seluruh Perwakilan OPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Materi yang dibawakan yakni:

1. Kebijakan Nasional Bantuan Hukum ASN;
2. Kebijakan Bantuan Hukum ASN Prov. Kaltara;
3. Implementasi PP No. 53 Tahun 2010 dan Perka BKN No. 21 Tahun 2010





Pemetaan Kompetensi PNS Jabatan Pelaksana/JFU Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Tanjung Selor, 13-14 Desember 2018



Pelaksanaan kegiatan ini diikuti oleh seluruh Pelaksana/JFU Pemprov. Kaltara. Pemetaan Kompetensi PNS Jabatan Pelaksana/JFU dilaksanakan dengan menggunakan Computer Assisted Test (CAT) BKN, tujuan kegiatan ini adalah

1. Mengukur preferensi kompetensi berupa Situational Judgement;
2. Mengidentifikasi gambaran karakteristik pribadi seseorang saat melakukan pekerjaan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dibutuhkan;
3. Memberikan rekomendasi rumpun pekerjaan yang sesuai dengan karakteristik pribadi.



BAB V

PENUTUP

Buku Laporan Kegiatan BKD merupakan salah satu perwujudan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki oleh Badan Kepegawain Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Buku ini menggambarkan keadaan ASN dan sebagai salah satu publikasi dan dokumentasi manual yang akan disusun dan diterbitkan setiap akhir tahun.

Namun demikian kami menyadari bahwa penyusunan Buku Laporan Kegiatan BKD Tahun 2018 ini jauh dari sempurna, oleh karena itu untuk publikasi berikutnya kritik dan saran dari berbagai pihak, guna perbaikan sangat diharapkan. Kami berharap Buku Laporan Kegiatan BKD ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan evaluasi sekaligus sebagai bahan acuan bagi peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

Akhir kata semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

